

OPERASI BEA CUKAI DAN POL PP SLEMAN

1.333 Batang Rokok Tanpa Pita Cukai Disita

GODEAN (KR) - Tim gabungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman bersama Bea Cukai DIY, Kodim, dan Polres Sleman kembali melakukan penertiban Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKCHT) ilegal di Sidoarum Kapanewon Godean, Rabu (9/8).

Penertiban dilakukan dalam rangka penegakan peraturan mengenai Anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau khususnya di Kabupaten Sleman. "Dalam penertiban kali ini sebanyak 1.333 batang rokok yang tidak memiliki cukai berhasil disita dari 2 titik lokasi toko kelontong yang digeledah. Ditemukan pula beberapa slop rokok jenis sigaret putih

atau proses denda administrasi ultimum remedium, yaitu penyelesaian tidak dilakukan penyidikan," tuturnya. Untuk besaran denda, menurut Pamadi, Bea Cukai DIY memberlakukan denda dengan jumlah 3 kali nilai cukai per bukti yang disita. "Misalnya, untuk sigaret putih mesih itu Rp 710 perbatang. Kalau satu bungkus bisa sekitar Rp 14.000 kemudian dikalikan tiga. Jadi bisa sekitar Rp 40 ribuan perbungkus. Tadi yang disita ada sekitar 40-50 bungkus, jadi bisa jadi senilai jutaan dendanya," jelasnya. Untuk itu, Pamadi

mengimbau agar masyarakat untuk tidak menjual tembakau ilegal tanpa cukai. Karena Bea Cukai DIY akan terus melakukan penertiban terkait BKCHT ini. "Yoga ini kan daerah pemasaran. Kita imbau ke warung-warung untuk tidak menjual, agar tidak kena denda. Kalau mereka tidak menjual, tidak akan menerima dari sales, otomatis akan berpengaruh ke pabrik yang tidak akan memproduksi lagi," tambahnya. Kepala Seksi Penegakan Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satpol PP Sleman

Pambudi menambahkan, Satpol PP Sleman terus melakukan sosialisasi kepada para pedagang untuk dapat memahami mengenai ketentuan BKCHT ini. "Para pedagang di Sleman jangan mencoba untuk menjual rokok ilegal tersebut. Pasti akan menimbulkan masalah nantinya," tandasnya. (Has)-f



Satu Tekad Mewujudkan Sleman Eliminasi TB

TBC atau tuberkulosis merupakan penyakit yang menjadi isu kesehatan global. Meski upaya penanggulangan TBC gencar dilakukan selama 70 tahun terakhir, namun ternyata kasus TB masih banyak dengan angka kematian cukup tinggi. TB merupakan salah satu penyakit menular yang disebabkan infeksi bakteri sehingga pengidapnya mengalami sesak napas disertai batuk kronis. Penyakit ini banyak menyerang kelompok usia produktif (25-34

Bupati Kustini



batkan lintas sektor. Tujuan pelibatan multi sektor adalah memberikan cakupan yang lebih luas dan peningkatan partisipasi masyarakat untuk memperoleh standar pelayanan minimal pemeriksaan kesehatan terduga TB sebagai hak setiap warga negara. Seperti diketahui, penanganan TB membutuhkan waktu karantina sekurang-kurangnya 2 bulan dan dilanjutkan pengobatan rutin hingga 6 bulan. Dalam masa penanganan ini dibutuhkan support sistem bagi penderita, yaitu bantuan selama kurun waktu 2 bulan dari Dinas Sosial, pendampingan dari Dinas P3AP2KB bagi penderita dan keluarga untuk meminimalisasi stigma dan diskriminasi dari masyarakat. Serta upaya tindak lanjut pencegahan penularan melalui rehabilitasi rumah tinggal yang sehat dan layak huni oleh Dinas PUPKPK.

Harus kita sadari TB memiliki efek domino cukup besar bagi penderitanya. Oleh karena itu penanganannya membutuhkan upaya sinergis lintas sektoral. Pemkab Sleman berkomitmen mempercepat eliminasi TB dengan melaksanakan gerakan SIKAT TB (Sleman Sigap Kendali dan Atasi Tuberculosis) sejak 2022. Melalui SIKAT TB, diharapkan seluruh pemangku kepentingan bersinergi dan bergerak Bersama dalam percepatan eliminasi TB tahun 2030. SIKAT TB masuk desa tahun 2023 diinisiasi di 2 Kalurahan yaitu Tamarmartani Kalasan dan Margoluwih Seyegan, mewakili wilayah Sleman Timur dan Sleman Barat.

Pada tahun 2023 ini, Pemkab Sleman tengah menyusun skenario penanganan komprehensif dalam penanggulangan TB melalui Rencana Aksi Daerah dan pembentukan Tim Percepatan Eliminasi TB. Dalam Rencana Aksi Daerah ini dirumuskan 6 strategi eliminasi TB yang meli-

port sistem bagi penderita, yaitu bantuan selama kurun waktu 2 bulan dari Dinas Sosial, pendampingan dari Dinas P3AP2KB bagi penderita dan keluarga untuk meminimalisasi stigma dan diskriminasi dari masyarakat. Serta upaya tindak lanjut pencegahan penularan melalui rehabilitasi rumah tinggal yang sehat dan layak huni oleh Dinas PUPKPK. Kami berkomitmen menuntaskan penanganan dan eliminasi TB. Melalui tulisan ini saya mengajak seluruh warga Sleman berperan menjadi agen penanggulangan TB di lingkungannya. Masyarakat dapat memanfaatkan pemeriksaan gratis melalui Posyandu Integratif, khususnya layanan Posyandu bagi usia produktif untuk memeriksakan diri dari risiko penyakit menular dan skrining TB. Saat ini Sleman memiliki 1.535 posyandu di 17 Kapanewon yang siap memberi pelayanan kepada masyarakat. Jumlah ini diharapkan mampu memberikan edukasi kesehatan termasuk melakukan skrining masalah kesehatan masyarakat.

Pastikan warga di lingkungan Anda sehat dan bebas TB dan salahkan hubungi Puskesmas terdekat untuk mendapatkan bantuan pengobatan secara cuma-cuma. Mari Nyawiji Eliminasi TB Sleman dengan SIKAT TB. Investasi Sehat untuk Masa Depan Sejahtera. □ f

HINDARI PENYALAHGUNAAN TKD

Ketua Dewan Minta Kalurahan Tertib Administrasi

TEMPEL (KR) - Ketua DPRD Kabupaten Sleman Haris Sugiharta SIP meminta kalurahan untuk tertib administrasi dalam penggunaan Tanah Kas Desa (TKD), khususnya akan digunakan untuk program Bantuan Khusus Keuangan (BKK). Hal itu untuk menghindari penyalahgunaan dan pelanggaran terhadap pemanfaatan TKD.



KR-Saifullah Nur Ichwan

Para lurah, ulu-ulu dan jagabaya mendapat penjelasan dari DLH dan Disperparu Sleman.

"Sebelum memanfaatkan TKD, kalurahan harus pastikan administrasi sudah selesai, seperti izin ke Gubernur DIY. Supaya nanti tidak menimbulkan permasalahan di belakang hari," kata Haris saat memfasilitasi pertemuan antara lurah, ulu-ulu dan jagabaya di Kapanewon Tempel dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

serta Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Disperparu), Rabu (9/8). Menurut Haris, dalam setiap pertemuan di Rakorvim tingkat Kapanewon, pihaknya mendapatkan keluhan dari lurah dan ulu-ulu adanya program BKK yang memanfaatkan TKD. Selama ini pihak kalurahan masih

terkendala izin dari Gubernur DIY. "Banyak kalurahan yang tidak berani melaksanakan program BKK, utamanya pembangunan balai warga. Soalnya pembangunan itu memanfaatkan TKD," terangnya. Haris berharap, pemerintah daerah juga harus memberikan kemudahan

terhadap perizinan pemanfaatan TKD yang akan digunakan kepentingan umum. Harapannya program BKK bisa tetap jalan sehingga tidak ada anggaran yang tersisa. "Tentu harus pengecualian, karena ini untuk kepentingan masyarakat umum. Supaya tidak selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran (silpa)," ucap politisi dari PDI Perjuangan ini.

Sedangkan Kepala Disperparu Sleman Mirza Anfansury ST MT menegaskan, untuk program-program BKK di kalurahan harus tetap berjalan dan izin tetap dilakukan. Nanti Disperparu Kabupaten Sleman dan DIY akan membantu proses perizinannya. (Sni)-f

WUJUD KOMITMEN PERUSAHAAN MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN

Pemkab Sleman Salurkan Realisasi TJSP Merdeka Rp 2,3 M

GEBYAR Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) Merdeka kembali dilaksanakan di Pendapa Parasmya Setda Sleman, Rabu (9/8). Agenda ini dilaksanakan sebagai wujud komitmen perusahaan dalam ikut serta meningkatkan kualitas kehidupan, khususnya di Kabupaten Sleman, pada momen peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia.

Pada kesempatan itu, Bupati Sleman Kustini menyerahkan bantuan secara simbolis dari 27 perusahaan dengan total dana sebesar Rp 2.386.541.000. Bupati didampingi Wakil Bupati Danang Maharsa dan Ketua Forum TJSP Sleman Dwi Nurwata menyerahkan bantuan secara simbolis kepada perwakilan penerima, yaitu sekolah, difabel, warga miskin, UMKM, lembaga sosial dan bantuan bibit pohon yang dikelola oleh DLH Sleman.

Perusahaan yang berpartisipasi dalam kegiatan Gebyar TJSP Merdeka tahun ini yaitu PT Bank BPD DIY, PT Indomarco Prisma-tama, PT BPR Bank Sleman, AMIKOM Yogyakarta, PDAM Sleman, PT Telkom Indonesia, PT Garuda Mitra Sejati, Grand Keisha, PT Berlico, PT Saliman Riyanto Raharjo, PT BRI Kancab Sleman, PT Bank Muamalat, PT Berlico, PT Kanisius, PT Mataram Tunggal Garmen, Warung SS, The Alana Yogyakarta Hotel &

Convention Centre, PT Tiga Raksa Satriya, PT Astra Motor, PT Marel Sukses Pratama, ADI TV, PT Inti Cakrawala/ Superindo, Hamzah Batik, PT Mega Andalan Kalasan, PT Bank Mandiri, PT TWC, PT Adi Satria Abadi, Indogrosir dan Andi Offset.

Bantuan diserahkan secara simbolis kepada 50 orang perwakilan. Bidang pemberdayaan sosial bantuan sembako/bahan makanan sejumlah 86 paket @ Rp 150.000, santunan ke pondok pesantren, bantuan donator/sumbangan untuk kegiatan dan warga sekitar perusahaan, bantuan iuran Jamsostek.

Bidang pendidikan untuk rehabilitasi sekolah jenjang TK, SD dan SMP, sekolah ramah anak, beasiswa pendidikan pelajar kurang mampu jenjang SD, SMA/SMK dan mahasiswa, bantuan peralatan/perengkapan sekolah, buku bacaan untuk perpustakaan. Bidang kesehatan berupa pengadaan ambulans, donor darah, susu UHT, pemberian vitamin, kegiatan posyandu. Bidang pemberdayaan ekonomi berupa bantuan modal kerja bagi UMKM, kredit kemitraan, bantuan gerobak angrkingan. Untuk pengembangan infrastruktur dan pelestarian lingkungan, renovasi taman, pengadaan bibit pohon dan penanaman pohon di lahan kritis.

Menurut Dwi Nurwata, realisasi



KR-Istimewa

Bupati Sleman Kustini menyerahkan bantuan TJSP untuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat berupa gerobak angrkingan.

Gebyar TJSP Merdeka 2023 mampu merangkul 27 perusahaan dan menyalurkan sebesar Rp 2,3 miliar. "Kami mengucapkan terima kasih atas peningkatan perolehan dan partisipasi seluruh anggota Forum TJSP Sleman," ujarnya.

Diberikan Dwi, realisasi anggaran TJSP Sleman juga mengalami peningkatan pada 3 tahun terakhir. Pada tahun 2020

lalu didapatkan realisasi Rp 7,1 miliar dengan partisipasi 22 perusahaan, tahun 2021 total realisasi sebesar Rp 10,1 miliar dengan partisipasi 45 perusahaan. Sementara itu untuk tahun 2022 realisasi meningkat menjadi sebesar Rp 12,3 miliar dengan partisipasi 67 perusahaan.

"Rata-rata peningkatan realisasi anggaran TJSP pada tiga tahun terakhir sebesar 23 persen. Untuk

itu kami ucapkan terima kasih dan kami mendoakan semoga perusahaan-perusahaan di Kabupaten Sleman dapat semakin kuat dan berkembang sehingga mampu memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Kabupaten Sleman," kata Dwi.

Ditambahkan, pelaksanaan Gebyar TJSP tahun ini dirangkai dengan berbagai kegiatan, di antaranya kegiatan pada bidang

pemberdayaan sosial, pemberdayaan ekonomi, hingga pengembangan infrastruktur dan pelestarian lingkungan. "Hal ini merupakan prestasi yang patut diapresiasi karena adanya peningkatan jumlah partisipasi aktif perusahaan dalam kegiatan Gebyar TJSP Merdeka," pungkas Dwi. Sementara Bupati Kustini menyampaikan terima kasih atas komitmen perusahaan-perusahaan di Kabupaten Sleman yang diwujudkan melalui TJSP. Dengan peningkatan realisasi setiap tahunnya, diharapkan tercipta sinergi yang lebih kuat untuk menuntaskan berbagai permasalahan di Kabupaten Sleman.

"Kami sampaikan terima kasih atas keseriusan bapak ibu dalam tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan realisasi pada tahun ini. Semoga dapat menjadi manfaat yang besar untuk seluruh masyarakat Kabupaten Sleman, baik untuk manfaat di bidang ekonomi, pendidikan, sosial, hingga kesehatan," katanya.

Bupati menambahkan, dalam mengentaskan permasalahan, pemerintah perlu berkolaborasi dengan seluruh pihak. Sehingga perusahaan di Kabupaten Sleman didorong untuk meningkatkan keaktifan dalam menciptakan kepedulian kepada sesama, sehingga dapat tercipta Kabupaten Sleman yang lebih sejahtera. (Has)-f



Bupati Sleman Kustini didampingi Wakil Bupati Danang Maharsa dan Ketua Forum TJSP Sleman Dwi Nurwata menyerahkan bantuan untuk penanaman pohon lahan kritis, bea siswa SMA/SMK dan bea siswa pelajar SD.



Bupati Sleman Kustini menyerahkan bantuan TJSP untuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat berupa gerobak angrkingan.



Bupati Sleman Kustini menyerahkan bantuan TJSP untuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat berupa gerobak angrkingan.